

## **BAB III**

### **TINJAUAN LOKASI**

#### **3.1. PRIORITAS PEMBANGUNAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN BARU**

Sistem lembaga kemasyarakatan Indonesia berada dibawah Direktorat Jenderal Kemasyarakatan dalam Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Setiap Provinsi memiliki kantor perwakilan atau kantor wilayah (kanwil) yang menangani seluruh Unit Pelaksana Teknis (UPT) pemasyarakatan di area provinsi tersebut. Setiap kanwil memiliki jumlah UPT berbeda – beda, bergantung pada luas wilayah, jumlah penduduk dan angka kriminalitas yang mempengaruhi jumlah terpidana di wilayah tersebut. Indonesia memiliki 523 UPT pemasyarakatan yang masih beroperasi hingga kini. UPT tersebut terdiri dari lembaga pemasyarakatan sebanyak 325 buah, 33 lembaga pembinaan khusus dan 165 rumah tahanan<sup>4</sup>. Sebanyak 420 UPT kini mengalami overkapasitas dan 263 unit diantaranya merupakan UPT lembaga pemasyarakatan.

Bangunan – bangunan lembaga pemasyarakatan yang kini mengalami overkapasitas perlu ditangani dengan cepat. Penanganan pertama dapat berupa perubahan konsep dan sistem penghukuman untuk menghasilkan sanksi yang memberi efek jera namun dalam durasi singkat. Penanganan kedua dapat berupa pembangunan gedung lembaga pemasyarakatan baru yang tentu menambah kapasitas penampungan warga binaan. Selama ini pembangunan lembaga pemasyarakatan baru sulit dilakukan akibat kebutuhan lahan yang cukup luas dan biaya yang dibutuhkan sangat besar (Chandra, 2019). Meskipun sulit, pemerintah melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sudah mencanangkan prioritas pembangunan untuk provinsi – provinsi dengan overkapasitas tertinggi.

---

<sup>4</sup> Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, 2019

**Tabel 3. 1** Provinsi Prioritas untuk Dibangun Lapas Baru

No	Kantor Wilayah	Kapasitas (Orang)	Isi (Orang)	Selisih
1.	Sumatera Utara	9.956	27.090	-17.134
2.	DKI Jakarta	5.851	16.346	-10.495
3.	Jawa Timur	11.675	22.102	-10.427
4.	Riau	3.526	10.500	-6.974
5.	Kalimantan Timur	3.021	9.795	-6.774
6.	Jawa Barat	15.925	22.134	-6.209
7.	Sumatera Selatan	6.162	11.710	-5.548
8.	Kalimantan Selatan	3.247	8.425	-5.178
9.	Lampung	3.970	7.348	-3.378
10.	Banten	4.659	7.987	-3.328

Sumber : Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 11 tahun 2017

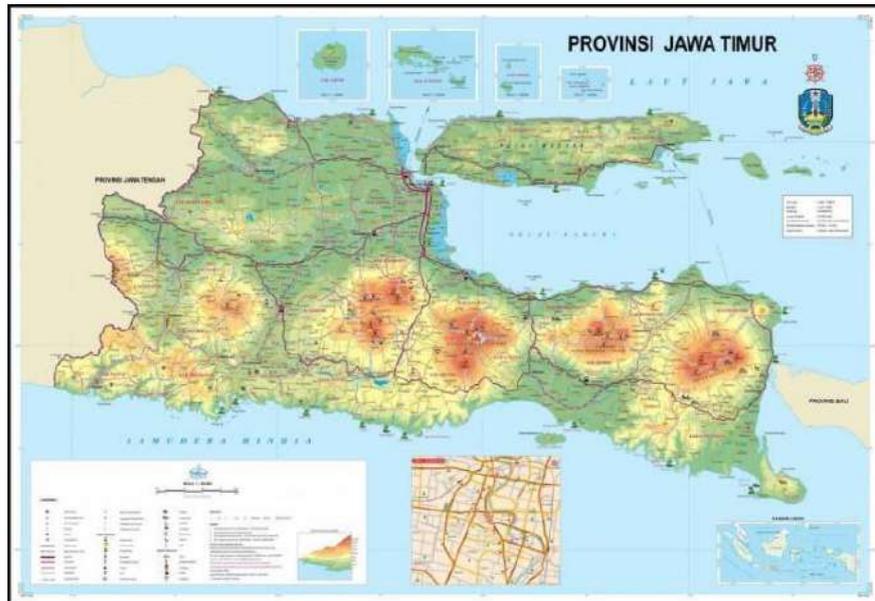
## **3.2. TINJAUAN PEMILIHAN LOKASI TAPAK LEMBAGA PEMASYARAKATAN UMUM KELAS IIA**

Pemilihan tapak akan mempertimbangkan beberapa aspek untuk mendukung aktivitas lapas. Aspek tersebut adalah tinjauan kebutuhan, tinjauan geografis, tinjauan administratif, dan tinjauan angka kriminalitas.

### **3.2.1. Tinjauan Geografis Provinsi Jawa Timur**

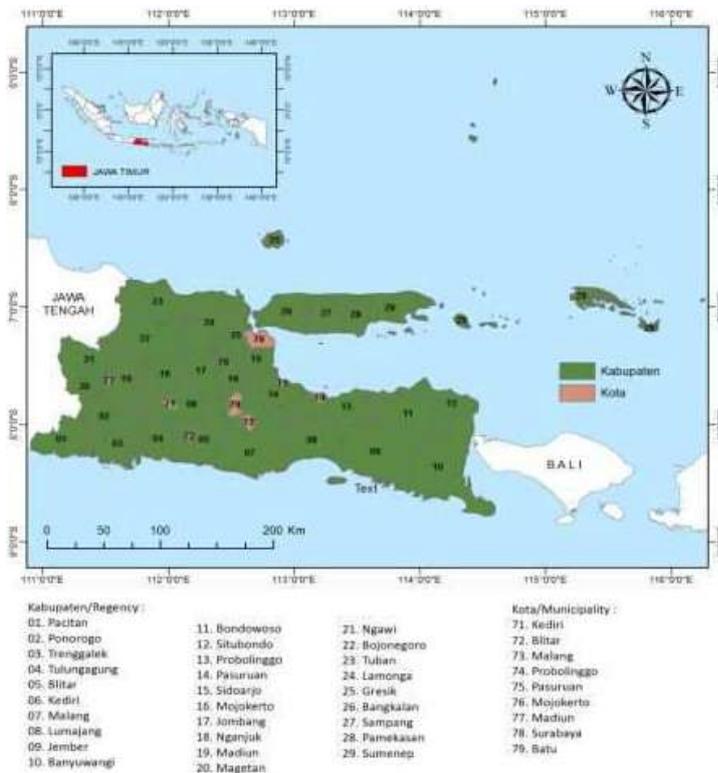
Provinsi Jawa Timur merupakan salah satu provinsi di Pulau Jawa. Secara astronomis, Jawa Timur terletak 111°0 Bujur Timur – 114°4' Bujur Timur dan 7°12'Lintang Selatan – 8°48" Lintang Selatan , dengan luas wilayah sebesar 47.963 km<sup>2</sup> yang meliputi dua bagian utama, yaitu Jawa Timur daratan dan Kepulauan Madura<sup>5</sup>. Luas wilayah daratan Provinsi Jawa Timur mencakup 88,7% dari luas keseluruhan atau 42.541 km<sup>2</sup>, sementara luas Kepulauan Madura adalah 11,3% atau 5.422 km<sup>2</sup>.

<sup>5</sup> Dinas Kominfo Provinsi Jawa Timur, 2015



**Gambar 3. 1** Peta Geografis Provinsi Jawa Timur  
 Sumber : Statistik Balai KSDA Jawa Timur 1 tahun 2008

### 3.2.2. Tinjauan Administratif Provinsi Jawa Timur



**Gambar 3. 2** Peta Administratif Provinsi Jawa Timur  
 Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, 2018

Provinsi Jawa Timur terbagi secara administratif kedalam 9 kota dan 29 kabupaten. Surabaya sebagai pusat pemerintahan juga menjadi Kota dengan kepadatan tertinggi, pusat ekonomi, pusat pendidikan sekaligus disertai dengan berbagai permasalahan yang rumit<sup>6</sup>. Oleh karena itu, keberadaan kota – kota satelit di sekitar Surabaya membantu kelancaran roda pemerintahan, ekonomi dan sektor – sektor vital lainnya. Keberadaan kota dan kabupaten di Jawa Timur juga dikoneksikan melalui jaringan transportasi, sehingga jarak antar kota atau kabupaten tidak menjadi halangan untuk kemajuan Provinsi Jawa Timur yang merupakan provinsi terluas di Pulau Jawa dan provinsi terluas ke – 12 di Indonesia<sup>7</sup>.

**Tabel 3. 2** Jarak Kota / Kabupaten dengan Ibukota Provinsi di Provinsi Jawa Timur

No.	Kota / Kabupaten	Ibukota Kota / Kabupaten	Jarak dengan Ibukota Provinsi (Kilometer)
1.	Kabupaten Gresik	Gresik	16
2.	Kabupaten Sidoarjo	Sidoarjo	23
3.	Kabupaten Bangkalan	Bangkalan	28
4.	Kabupaten Lamongan	Lamongan	46
5.	Kabupaten Mojokerto	Mojosari	49
-	Kota Mojokerto	Mojokerto	49

Sumber : Provinsi Jawa Timur Dalam Angka, 2018

Secara administratif dan geografis, Kota Surabaya sebagai ibukota provinsi memiliki kedekatan dengan kota atau kabupaten di sekitarnya. Keberadaan kota satelit menjadi cukup penting mengingat terbatasnya luas lahan Kota Surabaya. Keberadaan kota di sekitarnya menjadi sebuah keuntungan bagi Kota Surabaya karena

<sup>6</sup> Provinsi Jawa Timur dalam Angka, 2018.

<sup>7</sup> Badan Pusat Statistik, 2018

bangunan – bangunan pendukung jalannya roda pemerintahan dapat diletakkan di kota – kota tersebut, Contoh nyatanya seperti bangunan Lapas Kelas I Surabaya yang berada di Kabupaten Sidoarjo, Bandar Udara Juanda Surabaya di Kabupaten Sidoarjo, Terminal Purabaya di Kabupaten Sidoarjo dan bangunan – bangunan pendukung lainnya.

### **3.2.3. Tinjauan Demografis Provinsi Jawa Timur**

Provinsi Jawa Timur memiliki potensi cukup besar dari segi demografi. Pada tahun 2017, Provinsi Jawa Timur menjadi provinsi dengan penduduk berjumlah 39,293 juta jiwa dan menjadi provinsi berpenduduk terbanyak kedua di Indonesia, setelah Jawa Barat<sup>8</sup>. Badan Pusat Statistik (BPS) memproyeksikan pada tahun 2035, jumlah penduduk Provinsi Jawa Timur berkembang menjadi 41,127 juta jiwa. Jumlah penduduk yang cukup banyak tersebut dapat menjadi potensi sekaligus menimbulkan permasalahan baru.

Kota Surabaya masih menjadi kota di Provinsi Jawa Timur dengan penduduk terbanyak pada tahun 2017. Keunggulan tersebut dapat menjadi potensi sekaligus ancaman. Terdapat indikasi bahwa semakin tinggi jumlah penduduk, maka semakin padat dan semakin besar potensi terjadinya tindak kriminalitas (Handayani, 2017). Hal tersebut dapat menjadi perhatian khusus bagi Kota Surabaya dalam pencegahan maupun penanganan kriminalitas.

---

<sup>8</sup> Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, Provinsi Jawa Timur Dalam Angka 2018 (Surabaya : BPS Provinsi Jawa Timur, 2018), 395.

**Tabel 3.3** Jumlah Pendudukan dan Proyeksi Penduduk Setiap Kabupaten / Kota di Provinsi Jawa Timur

Kabupaten/Kota Regency/Municipality	Jumlah Penduduk (jiwa) Population (people)			Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun/Annual Population Growth Rate (%)	
	2010	2016	2017	2010 - 2017	2016 - 2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>Kabupaten/Regency</b>					
1. Pacitan	541 799	552 307	553 388	0,30	0,20
2. Ponorogo	856 682	868 814	869 894	0,22	0,12
3. Trenggalek	675 584	691 295	693 104	0,37	0,26
4. Tulungagung	992 317	1 026 101	1 030 790	0,54	0,46
5. Blitar	1 118 919	1 149 710	1 153 803	0,44	0,36
6. Kediri	1 503 095	1 554 385	1 561 392	0,54	0,45
7. Malang	2 451 997	2 560 675	2 576 596	0,71	0,62
8. Lumajang	1 008 486	1 033 698	1 036 823	0,40	0,30
9. Jember	2 337 909	2 419 000	2 430 185	0,55	0,46
10. Banyuwangi	1 559 088	1 599 811	1 604 897	0,41	0,32
11. Bondowoso	738 383	765 094	768 912	0,58	0,50
12. Situbondo	649 092	673 282	676 703	0,60	0,51
13. Probolinggo	1 099 011	1 148 012	1 155 214	0,71	0,63
14. Pasuruan	1 516 492	1 593 683	1 605 307	0,81	0,73
15. Sidoarjo	1 949 595	2 150 482	2 183 682	1,62	1,53
16. Mojokerto	1 028 605	1 090 075	1 099 504	0,95	0,86
17. Jombang	1 205 114	1 247 303	1 253 078	0,56	0,46
18. Nganjuk	1 019 018	1 045 375	1 048 799	0,41	0,33
19. Madiun	663 476	677 993	679 888	0,35	0,28
20. Magetan	621 274	627 984	628 609	0,17	0,10
21. Ngawi	818 989	829 480	829 899	0,19	0,05
22. Bojonegoro	1 212 301	1 240 383	1 243 906	0,37	0,28
23. Tuban	1 120 910	1 158 374	1 163 614	0,53	0,45
24. Lamongan	1 180 699	1 188 193	1 188 478	0,09	0,02
25. Gresik	1 180 974	1 270 702	1 285 018	1,21	1,12
26. Bangkalan	909 398	962 773	970 894	0,93	0,84
27. Sampang	880 696	947 614	958 082	1,20	1,10
28. Pamekasan	798 605	854 194	863 004	1,11	1,03
29. Sumenep	1 044 588	1 076 805	1 081 204	0,49	0,41
<b>Kota/Municipality</b>					
71. Kediri	269 193	281 978	284 003	0,77	0,72
72. Blitar	132 383	139 117	139 995	0,80	0,63
73. Malang	822 201	856 410	861 414	0,67	0,58
74. Probolinggo	217 679	231 112	233 123	0,98	0,87
75. Pasuruan	186 805	196 202	197 696	0,81	0,76
76. Mojokerto	120 623	126 404	127 279	0,77	0,69
77. Madiun	171 305	175 607	176 099	0,39	0,28
78. Surabaya	2 771 615	2 862 406	2 874 699	0,52	0,43
79. Batu	190 806	202 319	203 997	0,95	0,83
<b>Jawa Timur</b>	<b>37 565 706</b>	<b>39 075 152</b>	<b>39 292 972</b>	<b>0,64</b>	<b>0,56</b>

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, 2018

### 3.2.4. Tinjauan Tindak Pidana di Provinsi Jawa Timur

Kondisi overkapasitas juga berkaitan dengan banyaknya tindak pidana yang terjadi di Jawa Timur. Badan Pusat Statistik Jawa Timur mencatat, dalam 4 tahun terakhir terjadi 123.057 tindak pidana yang dilaporkan, namun hanya 88.821 kasus yang terselesaikan di pengadilan<sup>9</sup>. Hingga tahun 2019, Surabaya masih

<sup>9</sup> Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, Provinsi Jawa Timur Dalam Angka 2018 (Surabaya : BPS Provinsi Jawa Timur, 2018), 100.

menjadi kota dengan jumlah kasus pidana tertinggi, dan berdampak pada overkapasitas di kota tersebut.

**Tabel 3. 4** Kota / Kabupaten di Jawa Timur dengan Angka Tindak Pidana Tertinggi tahun 2017

No.	Wilayah Kepolisian	Jumlah Tindak Kriminal (Kasus)			
		2014	2015	2016	2017
1	Surabaya	5.191	6.650	7.817	5.197
2	Sidoarjo	1.180	1.987	3.805	4.646
3	Kabupaten Malang	1.178	1.379	1.857	2.311
4	Jombang	710	855	1.279	1.421
5	Tulungagung	592	867	1.029	1.014

Sumber : Kepolisian Negara Daerah Jawa Timur, 2018

Surabaya sebagai kota dengan jumlah pelaku tindak pidana terbanyak tentu membutuhkan bangunan lembaga pemasyarakatan untuk menampung para terpidana. Faktanya saat ini Surabaya merupakan kota dengan kepadatan tertinggi sehingga memaksa bangunan lembaga pemasyarakatan dibangun diluar wilayah Kota Surabaya (Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, 2018). Kota Surabaya memerlukan penanganan lebih serius terhadap permasalahan tindak pidana agar jumlahnya dapat terkontrol dan cenderung menurun. Kota atau Kabupaten lainnya memiliki luas wilayah yang lebih besar dan kepadatan yang lebih rendah sehingga masih mampu menangani permasalahan lembaga pemasyarakatan.

### **3.2.5. Kondisi Overkapasitas Lembaga Pemasyarakatan di Provinsi Jawa Timur**

Kantor Wilayah Jawa Timur memiliki 39 buah Unit Pelaksana Teknis (UPT). Keseluruhan UPT tersebut terdiri dari 21 UPT lapas umum, 1 UPT lapas narkoba, 1 UPT lapas perempuan, 1 UPT lapas

pemuda, 1 UPT lapas pembinaan anak, dan 14 UPT rumah tahanan. Overkapasitas terjadi pada 33 UPT dengan persentase beragam<sup>10</sup>. Kondisi tersebut memiliki korelasi dengan jumlah kematian warga binaan yang cukup tinggi di Jawa Timur. Tercatat dari keseluruhan kasus pada tahun 2016, Jawa Timur merupakan provinsi urutan teratas yang menjadi lokasi kematian narapidana (Wirya & Permata, 2017).

**Tabel 3. 5** Tabel Kondisi Overkapasitas UPT Lapas Jawa Timur

No.	Unit Pelaksana Teknis	Kapasitas (Orang)	Jumlah Penghuni (Orang)	Persentase Overkapasitas
1.	Lapas Kelas II B Jombang	200	825	313%
2.	Lapas Kelas II A Banyuwangi	260	991	281%
3.	Lapas Kelas II B Lumajang	162	600	270%
4.	Lapas Kelas I Malang	936	3.112	232%
5.	Lapas Kelas II A Sidoarjo	350	1.163	232%
6.	Lapas Kelas II B Blitar	185	559	202%
7.	Lapas Kelas II B Mojokerto	260	698	168%
8.	Lapas Kelas II B Lamongan	205	547	167%
9.	Lapas Kelas I Surabaya	1.038	2.759	166%

<sup>10</sup> Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, 2019

10.	Lapas Kelas II B Tulungagung	250	645	158%
-----	---------------------------------	-----	-----	------

Sumber : Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Oktober 2019

### 3.2.6. Tinjauan Kapasitas Kebutuhan Mendatang

Surabaya dengan angka kriminalitas tertinggi di Jawa Timur memiliki konsekuensi berupa tingginya jumlah warga binaan yang harus ditampung. Jumlah warga binaan cenderung bertambah, meskipun tidak semua kasus kriminalitas berujung pada sanksi kurungan. Overkapasitas pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Surabaya perlu dibantu oleh kota – kota di sekitarnya, akibat kepadatan Kota Surabaya sendiri sehingga menyulitkan upaya penambahan kapasitas.

**Tabel 3. 6** Data Jumlah Warga Binaan Lapas Kelas 1 Surabaya

No.	Tahun	Tertinggi (Orang)	Terendah (Orang)	Rata - Rata (Orang)	Kapasitas (Orang)
1	2011	1.602	1.313	1.481	1.038
2	2012	1.722	1.531	1.624	1.038
3	2013	1.536	1.028	1.382	1.038
4	2014	1.210	962	1.055	1.038
5	2015	1.438	1.075	1.193	1.038
6	2016	2.235	1.449	1.798	1.038
7	2017	2.637	2.251	2.512	1.038
8	2018	2.536	2.487	2.508	1.038
9	2019	2.803	2.538	2.709	1.038

Sumber : Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Januari 2021

Permasalahan overkapasitas pada lapas tentu tidak dapat diselesaikan sepenuhnya oleh pihak Direktorat Jenderal Pemasyarakatan saja. Perlu peran aktif dalam pengembangan masyarakat sehingga menghindari terjadinya tindak kriminal (preventif). Peran lapas juga tidak terbatas hanya menangani sanksi pada kota atau kabupaten tempatnya berada, tetapi menjadi

penopang pula bagi sekitarnya. Selama 15 tahun mendatang, akan terjadi peningkatan jumlah warga binaan hingga mencapai 5.153 orang pada tahun 2034.

Penanganan warga binaan pada Kota Surabaya dapat dibantu dengan mendirikan lapas baru di kota atau kabupaten sekitarnya yang memiliki jangkauan cukup dekat (dibawah 100 kilometer) dan akses yang mudah. Kekurangan kapasitas sebanyak 4.115 orang dapat dibantu dengan lapas – lapas di sekitarnya seperti Kabupaten Gresik, Mojokerto, Lamongan, Bangkalan, Sampang dan Pasuruan. Kota dan Kabupaten tersebut tidak memiliki lapas atau memiliki lapas namun dengan kapasitas rendah (kelas II B), sehingga berpotensi untuk dikembangkan.

**Tabel 3. 7** Proyeksi Jumlah Warga Binaan Lapas Kelas 1 Surabaya dalam 15 Tahun

No.	Tahun	Proyeksi (Orang)	Persentase Penambahan (%)
1	2020	2.687	-0,79
2	2021	2.864	6,55
3	2022	3.040	6,15
4	2023	3.216	5,79
5	2024	3.392	5,48
6	2025	3.568	5,19
7	2026	3.744	4,94
8	2027	3.920	4,70
9	2028	4.096	4,49
10	2029	4.273	4,30
11	2030	4.449	4,12
12	2031	4.625	3,96
13	2032	4.801	3,81
14	2033	4.977	3,67
15	2034	5.153	3,54

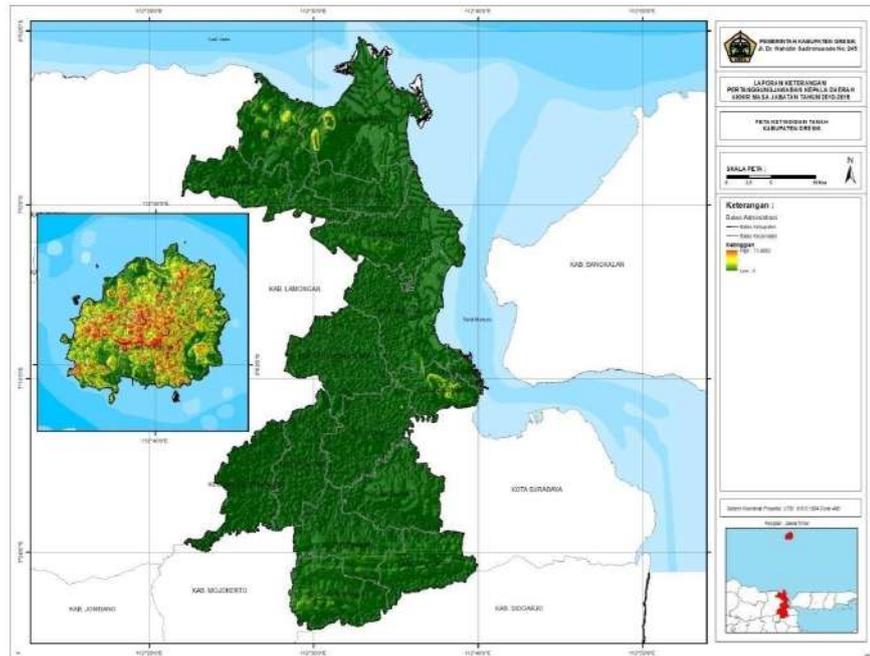
Sumber : Analisis Penulis, 2021

### **3.3. TINJAUAN PEMILIHAN LOKASI TAPAK LEMBAGA PEMASYARAKATAN UMUM KELAS IIA KABUPATEN GRESIK**

Kabupaten Gresik menjadi pilihan sebagai lokasi tapak karena lembaga pemasyarakatan yang dirancang akan menjadi penopang kebutuhan Kota Surabaya yang sudah overkapasitas. Keberadaan Kabupaten Gresik sebagai kota satelit memiliki jarak yang paling dekat dengan pusat Kota Surabaya dibandingkan dengan kota atau kabupaten lainnya sehingga memudahkan mobilisasi warga binaan. Jumlah tindak kriminal Kabupaten Gresik juga tidak termasuk dalam 5 besar sehingga keberadaan lapas baru tidak akan terbebani oleh jumlah narapidana dari Kabupaten Gresik sendiri. Hingga tahun 2019, Gresik juga belum memiliki Unit Pelaksana Teknis (UPT) lapas, dan hanya terdapat rumah tahanan (rutan) dengan kapasitas 200 orang. Selain dapat menampung kebutuhan dari Kota Surabaya, penempatan lapas di Kabupaten Gresik juga dapat menampung kebutuhan dari Gresik sendiri.

#### **3.3.1. Tinjauan Aspek Geografis**

Secara astronomis, Kabupaten Gresik terletak antara 112°-113° Bujur Timur dan 7°-8° Lintang Selatan. Batas – batas Kabupaten Gresik antara lain di utara merupakan Laut Jawa, di selatan berbatasan dengan Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Sidoarjo, dan Kota Surabaya, kemudian di sisi barat berbatasan dengan Kabupaten Lamongan, dan di sisi timur merupakan selat madura. Kabupaten Gresik merupakan dataran rendah dengan variasi ketinggian daratan mulai dari 0 – 25 meter diatas permukaan laut.



**Gambar 3. 3** Peta Geografis Kabupaten Gresik  
 Sumber : Bappeda Kabupaten Gresik, 2014

### 3.3.1.1. Iklim

Iklim Kabupaten Gresik termasuk tropis dengan temperatur rata – rata 28,5 °C dan kelembaban udara rata-rata 75%. Curah hujan relatif rendah, yaitu rata-rata 2.245 mm per tahun<sup>11</sup>. Keseluruhan Kabupaten Gresik memiliki iklim yang sama karena karakter geografis yang hampir seragam, mulai dari elevasi tanah, keberadaan sumber air hingga jarak ke laut.

<sup>11</sup> Bappeda Kabupaten Gresik, 2018.

**Tabel 3. 8** Curah Hujan Rerata Kabupaten Gresik  
Menurut Bulan

Bulan/Month	Rata-Rata Curah Hujan/ Yearly Rainfall Averages (Mm)					
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Januari/January	216,90	394,70	343,70	373,70	270,00	224,00
Februari/February	187,00	161,70	201,10	243,40	324,00	308,00
Maret/March	292,40	208,70	262,80	319,60	259,00	266,00
April/April	192,10	85,90	197,20	316,10	225,00	224,00
Mei/May	118,50	127,60	206,70	202,00	77,00	266,00
Juni/June	12,00	49,10	128,00	224,40	0,00	238,00
Juli/July	-	-	91,70	171,50	0,00	224,00
Agustus/August	-	-	35,00	4,00	0,00	140,00
September/September	-	-	-	-	0,00	266,00
Oktober/October	64,80	11,60	15,06	-	0,00	322,00
November/November	215,30	62,90	161,80	-	63,00	224,00
Desember/December	282,50	220,90	350,30	-	125,00	224,00

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Gresik, 2017

### 3.3.1.2. Kontur

**Tabel 3. 9** Luas Daerah Berdasarkan Ketinggian  
Kabupaten Gresik (Dalam Hektar)

No	Kecamatan	Ketinggian			Jumlah
		0 - 10 Meter dpl	10 - 20 Meter dpl	> 20 Meter dpl	
1	Wringinanom	0,00	6.254,00	0,00	6.262,00
2	Driyorejo	0,00	5.130,00	0,00	5.130,00
3	Kedamean	6.588,00	0,00	0,00	6.596,00
4	Menganti	6.196,00	0,00	0,00	6.367,00
5	Cerme	6.126,00	0,00	0,00	6.126,00
6	Benjeng	0,00	6.862,00	0,00	6.871,00
7	Balongpanggang	7.167,00	0,00	0,00	7.167,00
8	Duduksampeyan	7.440,00	0,00	0,00	7.449,00
9	Kebomas	2.966,00	0,00	0,00	3.433,00
10	Gresik	524,00	0,00	0,00	799,00
11	Manyar	8.287,00	0,00	0,00	8.671,00
12	Bungah	8.022,00	0,00	0,00	7.936,00
13	Sidayu	4.521,00	0,00	0,00	4.521,00
14	Dukun	5.909,00	0,00	0,00	5.909,00
15	Panceng	0,00	0,00	6.318,00	6.259,00
16	Ujungpangkah	9.470,00	0,00	0,00	10.406,00
17	Sangkapura	11.872,00	0,00	0,00	11.872,00
18	Tambak	7.755,00	0,00	0,00	7.739,00
	<b>Jumlah</b>	<b>92.843,00</b>	<b>18.246,00</b>	<b>6.318,00</b>	<b>119.513,00</b>
	<b>Prosentase</b>	<b>79,08</b>	<b>15,54</b>	<b>5,38</b>	<b>100,00</b>

Sumber : RPJMD Kabupaten Gresik 2016 – 2021



Keseluruhan jalan tersebut memiliki kondisi yang sangat baik sebesar 32,1%, kondisi cukup baik sebesar 37,9%, kondisi rusak sebesar 23,5%, dan sisanya dalam kondisi rusak berat<sup>13</sup>. Peletakan bangunan lapas di Kabupaten Gresik sebagai penunjang Kota Surabaya perlu memperhatikan akses terhadap Kota Surabaya. Akses utama dari dan menuju Kota Surabaya kini menggunakan jalan tol yang sudah terdapat beberapa akses keluar – masuk di beberapa kecamatan. Jalan tol dapat diakses melalui gerbang tol di Kecamatan Kebomas, Kecamatan Manyar, dan Kecamatan Driyorejo<sup>14</sup>. Pemilihan lokasi sangat direkomendasikan mendekati akses – akses utama jalan tol atau jalan – jalan nasional dan provinsi agar memudahkan mobilisasi warga binaan untuk keperluan pemindahan atau pemeriksaan. Pemerintah berencana mengembangkan jalan tol hingga Kabupaten Tuban, Provinsi Jawa Timur.

#### **3.3.1.4. Kepadatan Kota**

Persebaran penduduk Kabupaten Gresik lebih banyak mengarah ke area yang berdekatan dengan Kota Surabaya. Hal tersebut disebabkan banyaknya penduduk Kabupaten Gresik yang bekerja di Kota Surabaya sehingga membutuhkan akses yang cepat dan dekat. Kepadatan penduduk tertinggi berada di ibukota kabupaten, yakni Kecamatan Gresik. Selain menjadi pusat pemerintahan, Kecamatan Gresik juga menjadi tempat industri sehingga dipadati oleh masyarakat.

---

<sup>13</sup> Dinas Pekerjaan Umum Bidang Bina Marga Kabupaten Gresik, 2018

<sup>14</sup> Ibid.

**Tabel 3. 10** Tingkat Kepadatan Per Kecamatan Kabupaten Gresik Tahun 2017

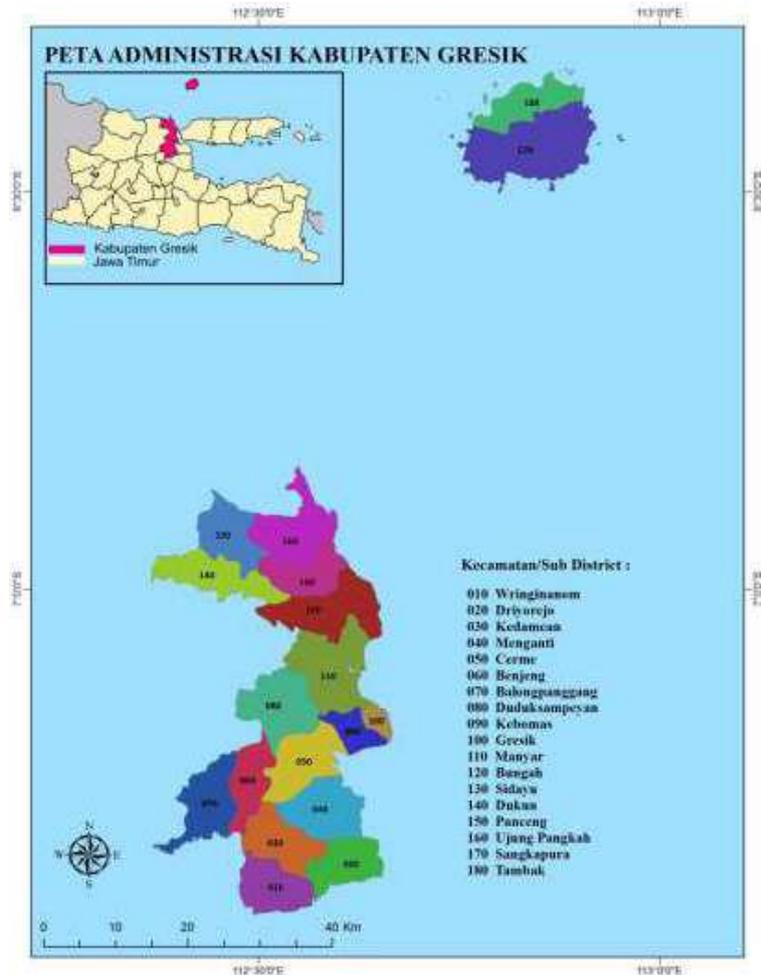
Kecamatan Subdistrict	Luas Wilayah Area Width (Km2)	Penduduk Population	Keluarga Families	Kepadatan Density	Rata-rata per Keluarga
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1 Wringinanom	62,62	72 894	23 299	1 164	3
2 Driyorejo	51,29	105 300	31 316	2 053	3
3 Kedamean	65,95	63 249	19 751	959	3
4 Menganti	68,72	124 132	36 878	1 806	3
5 C e r m e	71,73	78 724	22 364	1 098	4
6 Benjeng	61,26	66 786	20 078	1 090	3
7 Balongpanggang	63,88	58 678	18 054	919	3
8 Duduksampeyan	74,29	50 232	14 454	676	3
9 Kebomas	30,06	107 605	31 127	3 580	3
10 Gresik	5,54	82 940	24 750	14 971	3
11 Manyar	95,42	113 868	32 195	1 193	4
12 Bungah	79,44	67 720	19 234	852	4
13 Sidayu	47,13	43 782	12 030	929	4
14 Dukun	59,09	67 364	19 653	1 140	3
15 Panceng	62,59	52 392	14 906	837	4
16 Ujungpangkah	94,82	51 358	14 798	542	3
17 Sangkapura	118,72	68 504	18 525	577	4
18 Tambak	78,70	38 298	10 051	487	4
<b>Gresik</b>	<b>1 191,25</b>	<b>1 313 826</b>	<b>383 463</b>	<b>1 103</b>	<b>3</b>

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Gresik, 2018

Peletakan lapas sangat berkaitan dengan kepadatan penduduk. Lapas dapat diletakkan pada lokasi – lokasi dengan kepadatan yang tidak terlalu tinggi untuk memudahkan pengembangan lebih lanjut. Lokasi yang dipilih sebaiknya juga tidak mendekati area pemukiman dan industri agar tidak mengganggu kenyamanan masyarakat.

### 3.3.2. Tinjauan Aspek Administratif

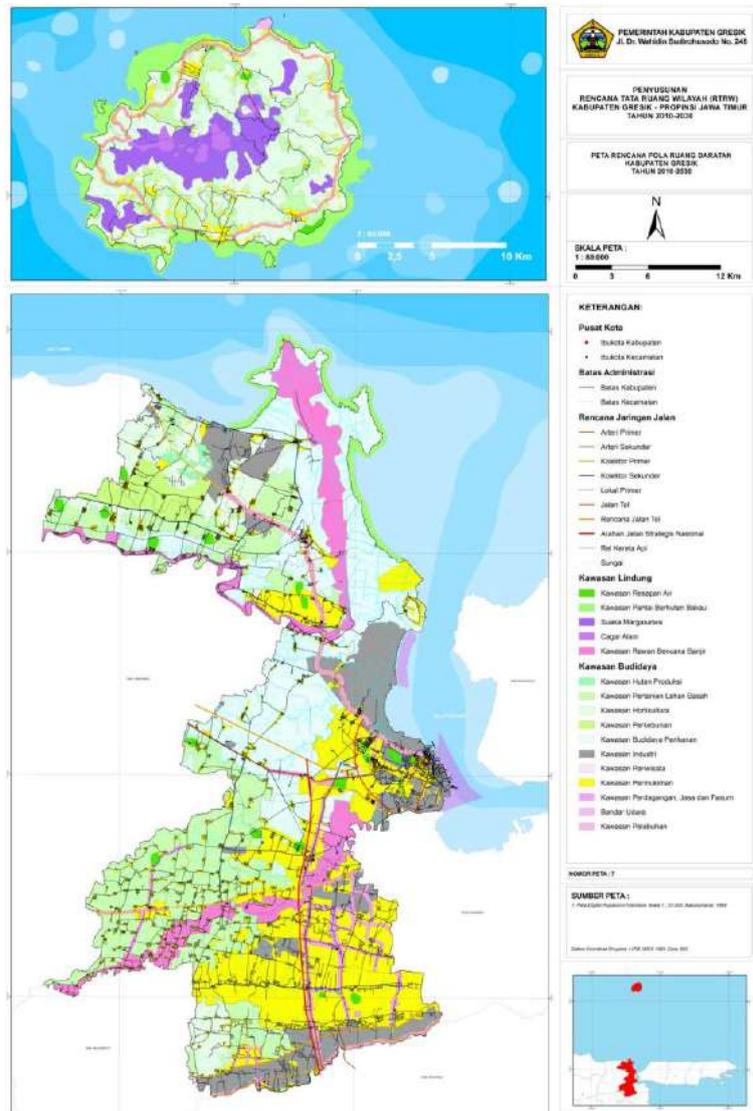
#### 3.3.2.1. Tinjauan Batas Administratif



**Gambar 3. 5** Peta Administratif Kabupaten Gresik  
Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Gresik, 2018

Kabupaten Gresik secara administratif terbagi dalam 18 kecamatan. Sebanyak 16 kecamatan berada di daratan Pulau Jawa dan sebanyak 2 kecamatan berada di Pulau Bawean.

### 3.3.2.2. Tinjauan Aspek Tata Guna Lahan



**Gambar 3. 6** Peta Rencana Pola Ruang Daratan Kabupaten Gresik

Sumber : Peraturan Daerah Kabupaten Gresik no. 8 Tahun 2011

Kabupaten Gresik memiliki luas 1.191,25 km<sup>2</sup>, dan terbagi kedalam beberapa fungsi lahan mulai dari pemukiman, komersial (perdagangan dan jasa), industri, hingga kawasan lindung. Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik melalui Perda no. 8 tahun 2011 membagi luas lahan berdasarkan fungsinya. Pembagian dan penempatan fungsi di Kabupaten Gresik bertujuan agar setiap fungsi dapat

saling bersinergi dan tidak berdampak negatif atau saling mengganggu.

Kabupaten Gresik memiliki sektor unggulan berupa sektor industri. Oleh karena itu, dibentuk kawasan – kawasan industri yang menampung berbagai jenis usaha dengan beragam skala produksi<sup>15</sup>. Produk industri unggulan yang dikembangkan di Kabupaten Gresik antara lain kerajinan kulit, kerajinan pahat dan patung, dan kerajinan songkok.

Peletakan bangunan lapas harus mempertimbangkan fungsi – fungsi yang ada di sekitarnya agar tidak menimbulkan gangguan atau keresahan bagi penduduk. Peletakan juga tidak direkomendasikan memangkas area hijau atau area resapan air karena akan menimbulkan permasalahan baru. Penempatan lapas juga mempertimbangkan potensi kebencanaan seperti banjir, pasang laut dan sebagainya.

### **3.3.3. Tinjauan Aspek Utilitas**

#### **3.3.3.1. Fasilitas Kesehatan**

Kabupaten Gresik memiliki fasilitas kesehatan yang cukup baik, tampak dari meratanya fasilitas kesehatan di hampir semua kecamatan. Secara total, Kabupaten Gresik memiliki 18 rumah sakit, 32 puskesmas, 1.517 posyandu dan 73 klinik. Meskipun memiliki jumlah banyak, penyebarannya berbeda – beda di tiap kecamatan dan bahkan terdapat kecamatan tanpa fasilitas rumah sakit atau klinik. Peletakan fasilitas lembaga pemasyarakatan perlu mempertimbangkan jarak dengan fasilitas kesehatan untuk

---

<sup>15</sup> Bappeda Kabupaten Gresik, 2018.

keperluan penanganan kesehatan warga binaan terlebih ketika terjadi situasi darurat.

**Tabel 3. 11** Jumlah Fasilitas Kesehatan di Kabupaten Gresik

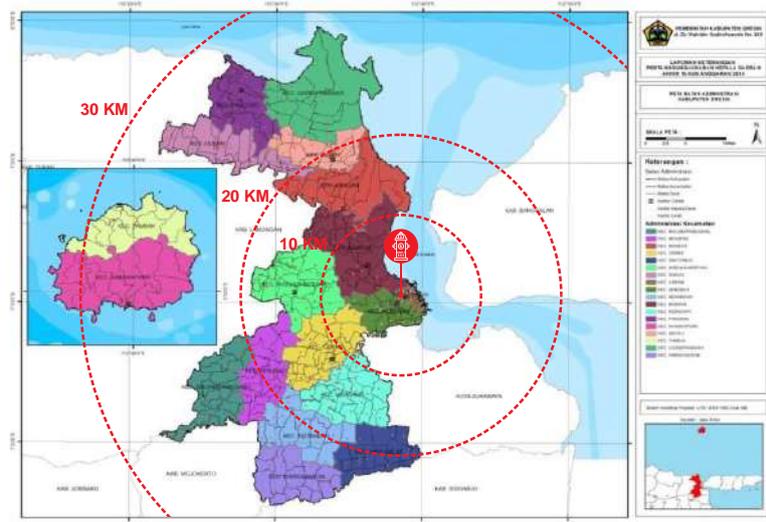
Kecamatan <i>Subdistrict</i>	Rumah Sakit <i>Hospital</i>	Puskesmas <i>Public Health Center</i>	Posyandu <i>Maternal &amp; Child Health Center</i>	Poliklinik <i>Clinic</i>	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
1	Wringinanom	0	2	72	7
2	Driyorejo	1	2	122	7
3	Kedamean	0	2	76	2
4	Menganti	2	2	127	5
5	Cerme	0	2	78	3
6	Benjeng	0	2	84	1
7	Balompanggung	2	2	80	0
8	Duduksampeyan	0	1	65	3
9	Kebomas	3	2	134	10
10	Gresik	4	3	111	8
11	Manyar	2	3	143	11
12	Bungah	1	1	73	3
13	Sidayu	1	1	52	1
14	Dukun	0	2	82	4
15	Panceng	0	1	49	0
16	Ujungpangkah	1	2	56	3
17	Sangkapura	1	1	68	4
18	Tambak	0	1	45	1
<b>Gresik</b>	<b>18</b>	<b>32</b>	<b>1517</b>	<b>73</b>	

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Gresik, 2018

### 3.3.3.2. Fasilitas Perlindungan Kebakaran

Lembaga pemasyarakatan memiliki jumlah penghuni yang cukup banyak sehingga berpotensi menimbulkan permasalahan seperti kerusakan yang berujung pada potensi kebakaran dan tentunya menimbulkan korban jiwa (Wirya & Permata, 2017). Peletakan lembaga pemasyarakatan perlu memperhatikan kedekatan dengan fasilitas pemadam kebakaran sehingga dapat merespon dengan cepat situasi darurat. Kabupaten Gresik memiliki 1 buah pemadam kebakaran yang berada di Jalan Dr. Wahidin Sudiro Husodo No. 102 B, Kelurahan Karangturi,

Kecamatan Gresik. Beberapa kecamatan yang menjadi prioritas penempatan lembaga pemasyarakatan yang memiliki jarak radius 10 kilometer dari pemadam kebakaran. Kecamatan tersebut adalah Kecamatan Kebomas, Kecamatan Manyar, Kecamatan Dudukssampeyan, Kecamatan Cerme dan Kecamatan Gresik sendiri. Prioritas kedua penempatan lembaga pemasyarakatan memiliki jarak radius 20 kilometer dari pemadam kebakaran. Kecamatan tersebut adalah : Kecamatan Sidayu, Kecamatan Menganti, Kecamatan Benjeng, Kecamatan Bungah, Kecamatan Kedamean dan Kecamatan Driyorejo.



**Gambar 3. 7** Radius Capaian Pemadam Kebakaran  
Kabupaten Gresik  
Sumber : Penulis, 2019

### 3.3.4. Tinjauan Aspek Regulasi

Kabupaten Gresik memiliki regulasi terkait bangunan, berupa peraturan Garis Sempadan Bangunan (GSB), Koefisien Dasar Hijau (KDH), Koefisien Dasar Bangunan (KDB), Koefisien Lantai Bangunan (KLB) dan Tinggi Bangunan (TB). Peraturan tersebut

tertuang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Gresik no 8 tahun 2011 dan akan lebih spesifik dalam Rencana Detil Tata Ruang (RDTR) untuk setiap kecamatan. Hingga tahun 2019, RDTR Kabupaten Gresik belum seluruhnya tersedia.

Berdasarkan data Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Gresik, ditetapkan besaran KDB 60%, KLB sebesar 2, dan KDH minimal 10% untuk bangunan publik dan 20% untuk bangunan privat. Peraturan lain mengenai garis sempadan ditentukan berdasarkan lokasi lahan, lebar jalan dan kelas jalan.

### 3.3.5. Tinjauan Pemilihan Lokasi Tapak

Kabupaten Gresik memiliki fasilitas utama seperti rumah sakit, pemadam kebakaran, kepolisian dan fasilitas penunjang lainnya secara lengkap di area ibukota kabupaten. Keberadaan fasilitas tersebut sangat diperlukan lapas sehingga peletakan lapas harus mendekati area tersebut. Dalam pembobotan lokasi kecamatan, dipilih 5 lokasi terdekat dengan Ibukota Kabupaten Gresik. Ke – 5 kecamatan tersebut adalah Kecamatan Gresik, Kecamatan Kebomas, Kecamatan Manyar, Kecamatan Cerme dan Kecamatan Duduksampeyan. Keseluruhan kecamatan dinilai berdasarkan faktor – faktor yang berpengaruh terhadap lapas, seperti kepadatan penduduk, kemudahan akses, tata guna lahan dan sebagainya. Hasil pembobotan menghasilkan Kecamatan Manyar dengan nilai tertinggi.

**Tabel 3. 12** Pembobotan Lokasi

No.	Aspek Penilaian	Bobot Penilaian	Kecamatan									
			Gresik		Kebomas		Manyar		Cerme		Duduksampeyan	
			Nilai	Bobot	Nilai	Bobot	Nilai	Bobot	Nilai	Bobot	Nilai	Bobot
1.	Kepadatan Penduduk	20%	40	8	60	12	80	16	80	16	100	20

	Terenda h											
2.	Akses	15%	90	13,5	100	15	90	13,5	90	13,5	90	13,5
3.	Tata Guna Lahan	15%	40	6	40	6	60	9	70	10,5	90	13,5
4.	Jumlah Angkata n Kerja	10%	70	7	90	9	100	10	70	7	50	5
5.	Fasilitas Kesehat an	15%	100	15	90	13,5	80	12	60	9	40	6
6.	Fasilitas Kebakar an	10%	100	10	100	10	90	9	80	8	80	8
7.	Fasilitas Keaman an	10%	100	10	90	9	80	8	80	8	80	8
8.	Fasilitas Lain	5%	80	4	100	5	50	2,5	70	3,5	40	2
<b>TOTAL</b>		<b>100%</b>	<b>73,5</b>		<b>79,5</b>		<b>80</b>		<b>75,5</b>		<b>76</b>	

Sumber : Analisis Penulis, 2019

### **3.4. TINJAUAN TAPAK TERPILIH LEMBAGA PEMASYARAKATAN UMUM KELAS IIA KECAMATAN MANYAR**

Berdasarkan analisis faktor – faktor pendukung lapas, didapat Kecamatan Manyar memiliki poin tertinggi. Kecamatan Manyar dianggap memenuhi aspek – aspek yang ditentukan dan dipilih sebagai area lokasi tapak. Dalam memilih tapak, terdapat 2 buah alternatif lokasi di Kecamatan Manyar dengan karakteristik yang berbeda. Setiap tapak akan diidentifikasi keunggulan maupun kelemahannya, kemudian dilakukan penilaian. Terdapat 4 aspek dalam penilaian tapak : kemudahan akses (kedekatan dengan pusat kota), kedekatan dengan fasilitas pendukung, orientasi tapak, dan jarak dengan fungsi lain di sekitarnya.

### 3.4.1. Lokasi Tapak Alternatif 1



**Gambar 3. 8** Tapak 1 dengan Luas 43.928,6 m<sup>2</sup>  
Sumber : <https://www.google.co.id/maps>, diakses November 2019

Tapak pilihan 1 berada di Jalan Nasional 17 Gresik – Tuban, Kelurahan Sembayat, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik. Tapak memiliki luas 43.928,6 m<sup>2</sup> dan memiliki orientasi ke barat. Kondisi eksisting tapak merupakan tanah pekarangan dan beberapa masih berupa tambak yang tidak aktif. Secara tata guna lahan, tapak tersebut termasuk area fungsi fasilitas umum dan komersial.

### 3.4.2. Lokasi Tapak Alternatif 2



**Gambar 3. 9** Tapak 2 dengan luas 40.186 m<sup>2</sup>

Sumber : <https://www.google.co.id/maps>, diakses November 2019

Tapak alternatif 2 berjarak sekitar 2 km dari tapak alternatif 1. Tapak memiliki luas 40.186 m<sup>2</sup> dengan orientasi ke utara. Serupa tapak alternatif 1, tapak alternatif 2 memiliki kondisi eksisting berupa tanah pekarangan dan beberapa masih berupa tambak yang tidak produktif. Secara tata guna lahan, tapak alternatif 2 termasuk area fungsi fasilitas umum dan komersial.

### 3.4.3. Pemilihan Tapak

No.	Kriteria	Tapak 1		Tapak 2	
		Nilai	Keterangan	Nilai	Keterangan
1.	Kemudahan Akses	90	Memiliki jarak yang sedikit lebih jauh dari pusat Kabupaten Gresik (15 km).	90	Memiliki jarak yang lebih dekat dari pusat Kabupaten Gresik (13 km).
2.	Kedekatan dengan Fasilitas Pendukung	80	-	85	Sedikit lebih dekat dengan fasilitas pendukung.
3.	Orientasi	70	Memiliki orientasi memanjang menghadap barat.	90	Memiliki orientasi memanjang menghadap utara.

4.	Jarak dengan Fungsi Lain	90	Tidak dikelilingi fungsi – fungsi dengan intensitas tinggi. Sekitar tapak masih didominasi tambak.	80	Dikelilingi fungsi industri dan pergudangan. Fungsi lain tidak terlalu mengganggu karena memiliki jalan lingkungan sendiri.
<b>NILAI</b>		<b>335</b>		<b>345</b>	

Alternatif tapak kedua memiliki beberapa kriteria yang lebih unggul dibandingkan tapak pertama. Orientasi tapak dan kedekatan dengan pusat kota menjadi keunggulan dari tapak kedua.